

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN FUNGSI PEMERIKSAAN INTERN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Ignasius Azevedo Hambur

edohambur@gmail.com

Farida Idayati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability, transparency, and internal checking function on local government performance of Regional Devices Organization (OPD) district of Sidoarjo. While, the population was the office of Regional Devices Organization (OPD) and their 15 agencies. The research was quantitative. Moreover, the data were primary with questionnaires as the instrument. At this point, the questionnaires were distributed to each OPD which adapted from the previous research. Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In the line with, since each OPD consists of 6 respondents, the total respondent became 90 respondents as sample. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result concluded accountability, transparency, and internal checking function had significant effect on local government performance of Regional Devices Organization (OPD) district of Sidoarjo. Furthermore, the result of coefficient determination value (R^2) was 80,9%. It meant, the accountability, transparency, and internal checking function had affected the local government performance of Regional Devices Organization (OPD) district of Sidoarjo. Meanwhile, the rest of 19,1% was affected by other variables which were not included on the regression model.

Keywords: accountability, transparency, internal checking function, government performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo. Populasi dalam penelitian ini adalah instansi/ lembaga yaitu Organisasi Kabupaten Sidoarjo yaitu sebanyak 15 OPD. Setiap OPD terdiri dari 6 sehingga total responden sebanyak 90 responden/sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menyebar kuesioner ke setiap OPD yang diadaptasi dari penelitian terdahulu. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Sidoarjo. Hasil ini diperkuat dengan perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 80,9% yang menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada OPD Kabupaten Sidoarjo dan sisanya 19,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model regresi tersebut.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, fungsi pemeriksaan intern, kinerja pemerintah.

PENDAHULUAN

Dalam pemerintah daerah tentang kinerja pemerintah menjadi sorotan publik. Dalam organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat hal ini dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Otonomi daerah ini mendapat implementasi dengan adanya

pengesahan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menghasilkan paradigma baru dalam mengatur dan mengelolah urusan pemerintah menurut asas otonomi secara luas, penuh dan bertanggungjawab pada daerah. Masyarakat menuntut pemerintah daerah dapat memberikan kinerja yang baik efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan ruang bagi masyarakat dalam mengikut sertakan diri dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah (Sihaloho *et al.*, 2013).

Dengan adanya kebijakan otonomi, daerah diberi wewenang dan tanggungjawab besar dalam mengelola keuangan serta mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengatasi permasalahan dan mengelola informasi kedaerahan serta sumber daya yang ada dapat diatur secara mandiri dan mencapai tujuan dari pembangunan. Wewenang dan tanggung jawab yang besar diberikan oleh pemerintah pusat dengan harapan pemerintah daerah dapat memberikan kemandirian dan kedewasaan untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing tanpa campur tangan pemerintah pusat lagi. Secara tidak langsung keberadaan dari otonomi daerah memberikan pendekatan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemberi pelayanan dan sebagai pihak yang dilayani, bahkan memberikan permasalahan baru kepada pemerintah daerah dan masyarakat terkait proses pembangunan daerah. Suatu usaha dalam pembangunan daerah yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah maupun kelompok masyarakat pada tingkat yang berbeda untuk saling menghadapi keterkaitan dan ketergantungan sosial ekonomi, aspek fisik dan aspek lingkungan sehingga menghasilkan peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

Dana perimbangan yang diperoleh tidak dapat dilihat dari seberapa besar pelaksanaan otonomi daerah, tetapi diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan atau sejauh mana instrumen/program keuangan daerah yang lebih adil, partisipatif, rasional, bertanggungjawab dan transparansi. UU No. 25 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlunya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pengelolaan laporan keuangan daerah. Dalam upaya pengelolaan pemerintah yang baik, pemerintah perlu melakukan berbagai cara dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan santandar akuntansi pemerintah dan peraturan perundang-undang yang ada terkait dengan konsep penerapan transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sistem pengembangan dan pengaplikasian akuntansi sektor publik diperlukan sebagai alat untuk melakukan transparansi dan merealisasikan tata kelola pemerintah yang baik serta mencapai *good governance (accounting for governance)* dalam mewujudkan akuntabilitas publik.

Disatu sisi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi masyarakat dan salah satu kunci untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Transparansi adalah suatu hal yang jelas dan nyata, atau keterbukaan informasi atas semua tindakan dan kebijakan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel. Informasi yang memadai dan mudah dipahami dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dalam organisasi. Dalam terlaksananya penyelenggaraan pemerintah tidak hanya akuntabilitas dan transparansi yang memiliki peranan penting tetapi ada sisi lain yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah, yaitu perlu adanya fungsi pemeriksaan intern. Fungsi utama pemeriksaan intern dalam pemerintahan yaitu membentuk pimpinan pemerintahan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian

serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintahan termasuk pengendalian akuntansi dan melakukan pelaporan kepada pimpinan pemerintah daerah.

Seiring dengan terbitnya otonomi daerah, tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik terjadi di berbagai pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan. Berkaitan dengan visi dan misi kinerja pemerintah harus diinformasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tingkat pencapaian hasil kinerja. Dari informasi kinerja yang disampaikan guna untuk pengambilan langkah selanjutnya yang akan diambil dengan pengkoreksian atas penetapan tindakan/program/kebijakan yang akan di ambil, dan sebagai umpan balik untuk bahan perencanaan pada saat yang bersamaan. Pengukuran kinerja sektor publik adalah berguna untuk membantu manajemen melalui sistem yang dapat menilai sejauh mana pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial maupun non finansial. rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (2) Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Sidoarjo; (3) Apakah fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo; (2) Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo; (3) Untuk menguji pengaruh fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan

Teori keagenan mendeskripsikan tentang hubungan dua pelaku ekonomi yaitu pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dalam teori keagenan hubungan merupakan suatu kontrak bahwa terdapat satu atau lebih orang (prinsipal) menyewa orang lain (agen) untuk menjalankan suatu jasa atas nama prinsipal dan di berikan wewenang untuk membuat keputusan yang baik untuk prinsipal (Ichsan, 2013). Teori keagenan dilakukan agar dapat memecahkan masalah jika terjadi ketidaksesuaian informasi atau tidak lengkapnya suatu informasi dalam melakukan suatu kontrak dengan manajemen (agen).

Dalam organisasi sektor publik teori keagenan telah diterapkan terutama pada pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta teori keagenan menjadi dasar dalam praktek pelaporan kinerja. Pemerintah yang bertindak sebagai pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja (agen) yang bertanggungjawab dalam menyajikan laporan kinerja dan laporan keuangan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai (prinsipal) yang menilai akuntabilitas serta membuat keputusan yang baik terkait keputusan sosial, politik dan ekonomi yang dibuat pemerintah. Terdapat masalah yang timbul dalam hubungan keagenan antara pihak agen dan pihak prinsipal yaitu terjadinya perbedaan informasi yang di dapatkan masyarakat (agen) dengan pemerintah (prinsipal). Agar dapat mengurangi hal tersebut perlu adanya suatu sistem yang bisa digunakan untuk memonitoring perilaku pemerintah (agen) agar bertindak sesuai dengan apa yang di harapkan masyarakat (prinsipal). Aktivitas tersebut menimbulkan biaya keagenan meliputi biaya monitoring agen, penciptaan sistem informasi akuntansi, biaya penciptaan standar dan biaya lain-lain. Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa teori keagenan yaitu hubungan yang melibatkan kedua pihak antara prinsipal yang membuat kontrak dengan pihak lain (agen) yang diharapkan dapat memenuhi apa yang menjadi tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari kesimpulan diatas teori keagenan dapat

meningkatkan akuntabilitas karena pihak pemerintah mempunyai kewajiban dalam menyampaikan informasi kinerja dan laporan keuangan yang berguna bagi pengguna serta sebagai pembuat keputusan sosial, politik dan ekonomi.

Teori signalling

Teori signal merupakan teori yang menjelaskan bagaimana suatu manajemen (agen) memberikan signal-signal kepada pengguna laporan keuangan terkait kerugian dan keberhasilan. Untuk menentukan prospek atau arah perusahaan dimasa mendatang teori ini berfungsi memberikan kemudahan bagi para investor dan mengembangkan saham yang di butuhkan manajemen. Syarat atau signal memberikan suatu sinyal, pemilik informasi (pihak pengirim) berusaha memberikan informasi yang relevan agar dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima (Spanse, 1973). Dalam organisasi sektor publik pelaksanaan teori signal merupakan amanah yang diberikan rakyat kepada pemerintah yang berkeinginan memberikan signal kepada masyarakat. Signal yang diterima masyarakat dari pemerintah berupa laporan kegiatan maupun laporan keuangan yang berkualitas, serta informasi yang dapat menggambarkan pengelola organisasi yang menjalankan kegiatan organisasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengurangi informasi asimetri pemerintah berupaya memberikan signal yang baik kepada masyarakat agar masyarakat terus mendukung pemerintah dalam proses perencanaan dan pembangunan berjalan dengan baik yaitu dengan cara penyampaian laporan kegiatan maupun laporan keuangan yang baik. Sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik maupun pertanggungjawaban, signal kinerja pemerintah yang baik perlu diinformasikan kepada masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dalam pemerintahan merupakan ciri dari penerapan *good governance*. Pencapaian kinerja keuangan secara terbuka dan terget-target anggaran serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua pertanyaan yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan fungsi merupakan tuntutan terhadap pemerintah pusat maupun daerah, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami informasi tersebut. Menurut LAN dan BPKP (2000:43) di lingkungan instansi pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip di instansi pemerintah dalam peningkatan akuntabilitas, yaitu: a) agar akuntabel harus adanya komitmen dari seluruh staff dan pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi; b) harus suatu sistem yang dapat mejamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; d) harus berorientasi pada hasil dan manfaat serta pencapaian visi dan misi yang di peroleh dan; e) harus objektif, inovatif, jujur, dan transparan sebagai katalisator perubahan manajemen teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas serta instansi pemerintah dalam pemutakhiran metode. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu elemen penting dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang baik.

Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dan salah satu prinsip *good governance*. Informasi yang dimaksud yaitu keterbukaan informasi yang dapat dijangkau publik mengenai aspek kebijakan pemerintah. Dari keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan toleran, kebijakan yang baik sesuai dengan referensi publik, dan persaingan politik yang sehat.

Fungsi Pemeriksaan Intern

Pemeriksaan dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisa, dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian suatu pendapat dan jika dipandang dan perlu direkomendasi. Pemeriksaan atas keuangan Negara dapat dilakukan oleh pemeriksian ekstern maupun intern pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemerintah berpedoman pada suatu standar pemeriksaan. Dalam pelaksanaannya pengawasan dapat dilakukan atau dilengkapi dengan pemeriksaan akan tetapi tidak setiap kegiatan pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan masyarakat. BPK berdasarkan keuangan dan konstitusi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan atas tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

Kinerja Pemerintah

Menurut Mahsun (2006:4) kinerja adalah hasil kerja yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan kerja. Dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi organisasi merupakan kinerja, gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan. Dalam Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 menyatakan kinerja adalah hasil atau keluaran perogram atau kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Seluruh aktivitas sumber daya baik secara finansial maupun non finansial harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan kinerja disuatau instansi pemerintah dan dalam pengukuran tersebut tidak semata-mata bergantung pada masukan (*input*) dari kegiatan tersebut tetapi lebih pada pengukuran yang menekankan pada keluaran (*output*) yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Menurut Permenpan No. 25 Tahun 2012, petunjuk dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai kegagalan/keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa elemen pokok yang dapat mengukur suatu kinerja seperti ukuran kinerja dan indikator, mengevaluasi hasil kerja dan tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran organisasi, sasaran, strategi, dan tujuan organisasi. Tujuan pengukuran kinerja dari persepekif eksternal kepemerintahan yaitu untuk membangun kredibilitas dan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat kembali.

Dalam terwujudnya tujuan, sasaran, visi, dan misi organisasi dalam peroses pelaksanaannya kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat dijadikan kesimpulan dari uraian diatas. Sejauh mana karyawan dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu organisasi, pencapaian hasil kinerja digunakan oleh pemerintah sebagai tolak ukurnya. Konsep utama dalam menunjukan seberapa meningkatnya kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi yang dilakukan dalam proses pencapaian tujuan adalah kinerja.

Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pemerintah

Akuntabilitas memiliki beberapa makna yaitu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, nepotisme, dan kolusi, upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan (Wiguna *et al.*, 2014), Saputra *et al.*, (2014), Damayanti dan Suwardi (2018), membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga dapat dikatakan akuntabilitas mempengaruhi kinerja dalam proses penyelenggaraannya.

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah

Transparansi merupakan keterbukaan informasi dan salah satu prinsip *good governance*. Sudah banyak penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah diantaranya (Wiguna *et al.*, (2014), Saputra *et al.*, (2014), Damayanti dan Suwardi (2018) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Tingkat transparansi yang tinggi memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan/program penyelenggaraan pemerintah.

H₂ : Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah

Secara umum pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif dengan pemberian pendapat atau apabila di pandang perlu direkomendasi. Pemeriksaan atas keuangan negara dapat dilakukan oleh pemeriksaan intern dan pemeriksa ekstern pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan, dan pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada suatu standar pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan atau dilengkapi dengan pemeriksaan akan tetapi tidak setiap kegiatan pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan, seperti pengawasan yang dilakukan antara lain oleh DPR dan masyarakat. Satuan kerja atau instansi yang berada dan dibentuk didalam dan merupakan bagian organisasi pemerintah. Pemeriksaan intern pemerintah mempunyai fungsi utama yaitu untuk membentuk pimpinan pemerintah, melakukan tugas pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk pengendalian akuntansi dan melaporkannya kepada pimpinan pemerintah pusat di daerah (Ratnawati dan Arnold, 2011). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jitmau (2017) yang menunjukkan bahwa peran manajerial KPD dan fungsi pemerintahan intern memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati dan Arnold (2011) juga menjelaskan bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₃ : Fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah dengan jenis penelitian kasual komperatif. Penelitian kasual komperatif adalah perbandingan antara variabel/objek dengan subjek berbeda yang dilakukan untuk menemukan hubungan sebab-akibat serta. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai OPD Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai wewenang dalam meningkatkan kinerja pemerintah yang berkaitan dengan proses akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern.

Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2008:31) sampel dapat diartikan sebagai karakteristik yang dimiliki dan jumlah yang akan diambil dari populasi tersebut. Sampel yang akan diambil harus dapat mewakili populasi. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) variabel independen dan 1 (satu) variabel dependen. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan

adalah 85 responden dari 15 OPD Kabupaten Sidoarjo, dimana setiap OPD diberikan 6 kuesioner. Responden yang akan dituju dalam penelitian ini Kepala Dinas, Pejabat Setingkat, Kepala Sub Bagian Keuangan, setingkat kepala Sub Bidang dan Staff.

Teknik Pengumpulan Data

Perosedur pengumpulan data atau sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kuesioner. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh langsung dari sumber datanya (responden) yang menjadi subyek penelitian atau sasaran dengan mengajukan daftar pertanyaan yang terstruktur kepada responden. Metode survei menjadi pendukung dipenelitian ini dalam pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner. Penelitian tentang gambaran umum dari karkteristik populasi yang digambarkan oleh sampel serta menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibagikan kepada responden agar dapat memperoleh data yang valid dan objektif, dengan harapan sampel dapat mewakili keberadaan populasi sehingga hasilnya dapat diambil suatu kesimpulan dan dapat digeneralisasikan.

Variabel dan Defenisi Oprasional Variabel

Menurut Sugiyono (2008: 31) Variabel penelitian adalah sifat atau nilai atau atribut dari obyek, orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini akan menguji variabel independen yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern dengan variabel dependennya yaitu kinerja pemerintah daerah.

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban dalam pemerintahan merupakan ciri dari penerapan *good governance* serta pencapaian kinerja keuangan secara terbuka dan terget-target anggaran serta mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua pertanyaan yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan dan fungsi merupakan tuntutan terhadap pemerintah pusat maupun daerah. Dalam variabel akuntabilitas kuesioner diadaptasi dari penelitian oleh Sopanah dan Isa (2010). Penelitian ini menggunakan indikator yang diperkenalkan oleh Mardiasmo (2006) yaitu, (1) hukum dan akuntabilitas kejujuran; (2) akuntabilitas proses; (3) akuntabilitas kebijakan; (4) akuntabilitas program.

Transparansi merupakan azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan atau perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara. Dalam variabel transparansi kuesioner diadaptasi dari Sopanah dan Isa (2010). Penelitian ini menggunakan indikator dari Krina (2003) meliputi: (1) kemudahan akses informasi; (2) penyediaan infomasi yang jelas tentang biaya-biaya, prosedur-prosedur, dan tanggungjawab; (3) melalui kerjasama dengan pihak non pemerintah dan media massa dapat meningkatkan arus informasi; (4) jika ada peratauran yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap harus menyusun suatu mekanisme pengaduan.

Fungsi pemeriksaan intern merupakan suatu fungsi yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan, terutama dalam pertanggung jawaban keuangan Negara. Kuesioner pada variabel fungsi pemeriksaan diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aristanti (2011). Pada penelitian ini menggunakan indikator dari COSO; Bastian (2008); PP No.60 Tahun 2008 yaitu (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; (5) pemantauan.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat ditunjukkan dengan kemampuan kerja serta dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi organisasi merupakan kinerja, gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan. Dalam variabel kinerja pemerintah, kuesioner diadaptasi dari Sumarno (2005). Penelitian ini menggunakan indikator dari penelitian yang dilakukan oleh Sumarno (2005) yaitu (1) perencanaan; (2) investigasi; (3) pengkoordinasian; (4) evaluasi; (5) pengawasan; (6) pemilihan staff; (7) perwakilan; (8) negosiasi; (9) kinerja secara keseluruhan.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai gambaran dari responden dan tentang variabel-variabel dari penelitian yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang menunjukkan nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi (penyimpangan baku), minimum, dan maksimum setiap variabel. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran umum dari sampel atau deskripsi mengenai variabel yang diteliti.

Uji Validitas

Uji validitas merupakan pengukuran sah atau valid tidaknya suatu kuesioner yang kita gunakan. Menurut Ghozali (2016) dikatakan valid tidaknya suatu kuesioner apabila pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa yang hendak dikaji dengan menggunakan kuesioner tersebut dan dasar analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu: (1) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka indikator atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka indikator atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa konsistensi jawaban dan sejauh mana jawaban kuesioner tersebut memiliki kesamaan pada waktu yang berbeda-beda. Dikatakan reliabel atau handalnya suatu kuesioner jika diadakan pengujian ulang dapat memberikan jawaban seseorang atas pertanyaan yaitu tetap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menggunakan koefisien *cronsbach's alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel merupakan pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini. Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronsbach's Alpha* $> 0,60$. Sebaliknya dikatakan tidak reliabelnya suatu butir atau indikator pertanyaan jika nilai *Cronsbach's Alpha* $< 0,60$ (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak yaitu menggunakan uji normalitas. Tujuan dari uji normalitas yaitu menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Melalui *probability plot* dengan membandingkan distribusi normal dan kumulatif dapat menguji apakah distribusi tersebut normal atau tidaknya. Menurut Ghozali (2016) distribusi data normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal serta data plotting akan dibandingkan dengan garis diagonal. Menggunakan uji non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S) untuk menguji normalitas residual. Yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan analisis uji statistik non-parametrik K-S yaitu: (1) Model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila hasil 1-sample K-S diatas tingkat signifikan 0,05 menunjukkan pola distribusi normal. (2) Model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas apabila hasil 1-sample K-S dibawah tingkat signifikan 0,05 tidak menunjukkan pola distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen (bebas). Apabila variabel independen saling berkorelasi maka terjadi masalah multikolinearitas, sebaliknya jika tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel independen maka model regresi tersebut baik untuk melihat gejala multikolinearitas, dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut: (a) Bila nilai *tolerance* > 0,1 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas; (b) Bila nilai *tolerance* ≤ 0,1 maka terdapat masalah multikolinearitas; (c) Bila VIF < 10 maka tidak terdapat masalah multikolinearitas; (d) Bila VIF ≥ 10 maka terdapat masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain merupakan tujuan dari uji heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi linear, yaitu syarat tidak adanya heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016) model regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas: (a) Jika pola tertentu, seperti ada titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), mengindikasikan telah terjadinya heteroskedastisitas. (b) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta mengetahui arah hubungan antara kedua variabel tersebut apakah variabel independen berpengaruh positif atau negatif dan memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen terjadi penurunan ataupun kenaikan. Berikut metode statistik regresi linier berganda:

$$KP = a + \beta_1 AK + \beta_2 TR + \beta_3 PI + e$$

Keterangan :

- KP : Kinerja Pemerintah
- α : Konstanta
- β : Koefisien Regresi
- AK : Akuntansi
- TR : Transparansi
- PI : Fungsi Pemeriksaan Intern
- e : *error*

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dalam penelitian uji F digunakan untuk menguji kelayakan model yang dihasilkan dengan uji kelayakan model pada tingkat α sebesar 5%. Berikut kriteria pengujiannya: (a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian tidak layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya. (b) Jika nilai signifikan < 0,05 maka model yang digunakan dalam penelitian layak dan dapat dipergunakan analisis berikutnya.

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk mencari seberapa besar variasi variabel independen dapat menjelaskan secara keseluruhan variasi variabel dependen perlu digunakan koefisien determinasi R² serta koefisien determinasi R² dapat mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen

terhadap naik turunnya variasi nilai secara keseluruhan pada variabel dependen. Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen, kisaran nilai R^2 antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin besar variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen maka semakin besar nilai R^2 sebaliknya, semakin kecil variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen maka semakin kecil nilai R^2 .

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Tujuan dari pengujian hipotesis ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Menurut Ghozali (2011) melakukan uji t yaitu dengan cara menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 ($\alpha=5\%$). Berikut beberapa ketentuan dalam penerimaan dan penolakan hipotesis (a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Yang diartikan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; (b) Jika nilai signifikan $t \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Yang diartikan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Teknik Analisis Data

Analisis statistik deskriptif akan terdapat gambaran variabel penelitian meliputi variabel Independen yaitu akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern (X) dan variabel dependen yaitu kinerja pemerintah (Y). Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran atau deskriptif dari suatu data variabel dalam penelitian. Dalam Tabel 1 berikut ini akan disajikan data berdasarkan jawaban dari responden di OPD kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Akuntabilitas	85	3,11	5,00	4,220	0,354
Transparansi	85	3,00	5,00	4,196	0,374
Fungsi Pemeriksaan Intern	85	3,50	5,00	4,254	0,317
Kinerja Pemerintah	85	3,44	4,89	4,154	0,346
Valid N (listwise)	85				

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan dari Tabel 1, terdapat bahwa jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 85 data berdasarkan hasil jawaban dari pembagian kuesioner pada 15 OPD yang telah dikembalikan, dari hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 5 diketahui, yaitu: (1) Variabel akuntabilitas dihasilkan kisaran jawaban responden sebesar 3,11 sampai dengan 5,00, artinya bahwa tingkat jawaban terendah pada akuntabilitas berada di kisaran 3,11 dan yang tertinggi berada pada kisaran 5,00. Maka dapat dikatakan jawaban responden berdominan setuju dengan pertanyaan kuesioner. Pada akuntabilitas nilai mean sebesar 4,220, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,354, maka dapat ditarik kesimpulan responden memberi pendapat setuju dengan pertanyaan mengenai Akuntabilitas yang disajikan peneliti pada kuesioner; (2) Variabel transparansi dihasilkan kisaran jawaban sebesar 3,00 sampai dengan 5,00 yang artinya bahwa tingkat jawaban terendah pada transparansi berada di kisaran 3,00 dan yang tertinggi pada kisaran 5,00. Maka dapat dinyatakan bahwa jawaban responden lebih dominan setuju. Pada transparansi nilai mean sebesar 4,196, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,374, maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju pada pertanyaan kuesioner transparansi yang disajikan peneliti; (3) Variabel fungsi pemeriksaan dihasilkan kisaran jawaban responden sebesar 3,50 sampai dengan 5,00 yang berarti bahwa tingkat jawaban terendah pada akuntabilitas berada di kisaran 3,50 dan tertinggi berada pada kisaran 5,00. Maka dapat dikatakan bahwa jawaban dari responden lebih dominan setuju. Pada akuntabilitas nilai mean sebesar 4,254 sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,354,

sehingga dapat disimpulkan responden berpendapat setuju pada pertanyaan yang disajikan peneliti pada kuesioner; (4) Variabel kinerja pemerintah dihasilkan kisaran jawaban sebesar 3,44 sampai dengan 4,89 artinya bahwa tingkat jawaban terendah pada akuntabilitas berada di kisaran 3,44 dan yang tertinggi berada pada kisaran 4,89. Maka dapat dikatakan bahwa jawaban dari responden lebih dominan memilih setuju. Pada kinerja pemerintah nilai mean sebesar 4,154, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,346, sehingga dapat disimpulkan responden berpendapat setuju pada pertanyaan yang telah disajikan peneliti pada kuesioner.

Uji Validitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji, sehingga diperoleh hasil olahan data yang kemudian disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas

Item	r hitung	r tabel	Keterangan
AK1	0,400	0,192	Valid
AK2	0,451	0,192	Valid
AK3	0,680	0,192	Valid
AK4	0,711	0,192	Valid
AK5	0,360	0,192	Valid
AK6	0,485	0,192	Valid
AK7	0,414	0,192	Valid
AK8	0,698	0,192	Valid
AK9	0,408	0,192	Valid
TR1	0,418	0,192	Valid
TR2	0,482	0,192	Valid
TR3	0,720	0,192	Valid
TR4	0,759	0,192	Valid
TR5	0,379	0,192	Valid
TR6	0,516	0,192	Valid
TR7	0,239	0,192	Valid
TR8	0,744	0,192	Valid
PI1	0,595	0,192	Valid
PI2	0,651	0,192	Valid
PI3	0,302	0,192	Valid
PI4	0,409	0,192	Valid
PI5	0,310	0,192	Valid
PI6	0,646	0,192	Valid
PI7	0,548	0,192	Valid
PI8	0,326	0,192	Valid
KP1	0,456	0,192	Valid
KP2	0,41	0,192	Valid
KP3	0,393	0,192	Valid
KP4	0,279	0,192	Valid
KP5	0,382	0,192	Valid
KP6	0,689	0,192	Valid
KP7	0,714	0,192	Valid
KP8	0,489	0,192	Valid
KP9	0,424	0,192	Valid

Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah).

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan semua item pertanyaan pada variabel akuntabilitas, transparansi, pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah bahwa nilai validitas lebih besar dari 0,192 sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid karena r hitung dari masing-masing item pertanyaan lebih besar dari r tabel.

Uji Reliabilitas

Uji realibilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana jawaban kuesioner yang telah disebar mempunyai konsistensi yang digunakan pada waktu yang berbeda. Uji reabilitas ini diukur menggunakan koefisien *cronsbach's alpha* dalam satu variabel dari masing-masing instrument. Uji reliabilitas ini akan disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronsbach Alpha</i>	Keterangan
Akuntabilitas	0,712	Reliabel
Transparansi	0,714	Reliabel
Fungsi Pemeriksaan Intern	0,684	Reliabel
Kinerja Pemerintah	0,677	Reliabel

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Bedasarkan Tabel 3, menunjukkan hasil pengujian reliabilitas dari tabel variabel akuntabilitas, transparansi, fungsi pemeriksaan intern dan kinerja pemerintah memperoleh nilai *Cronbach's alpha* > 0,60 dan dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel pada penlitian ini dinyatakan reliabel yang digunakan untuk mengukur indikator atau pertanyaan dari kuesioner penelitian.

Uji Normalitas

Berikut adalah hasil uji normalitas menggunakan uji statistic *I-Sampel K-S* yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		85
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	,15164158
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,071
	<i>Positive</i>	,071
	<i>Negative</i>	-,038
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		,657
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,781

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Bedasarkan Tabel 4 diketahui bahwa *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,657 dan nilai *Asymp.signifikansi* sebesar 0,781 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan dikatakan layak dalam penelitian ini.

Uji Multikolinearitas

Berikut adalah Tabel 5 yang akan menyajikan uji multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)		
Akuntabilitas	0,336	2,908
Transparansi	0,235	2,923
Fungsi Pemeriksaan Intern	0,752	1,330

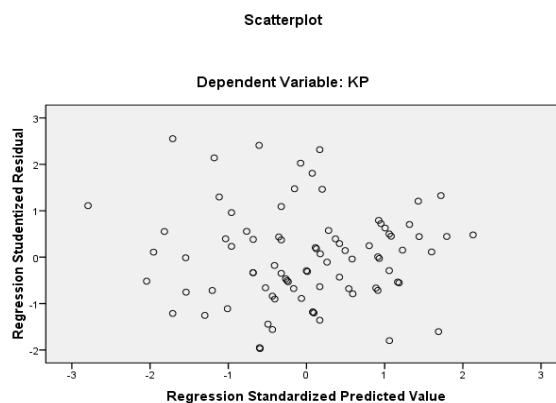
a. Dependen Variabel: KP

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5, diketahui bahwa ketiga variabel yaitu akuntabilitas (AK), Transparansi (TR), Fungsi Pemeriksaan Intern (PI) memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ada multikolinearitas antara variabel dan dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk dijadikan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut adalah gambar hasil uji Heteroskedastisitas, yang nampak pada Gambar 1.



Gambar 1
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada bentukan pola, titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi pada model regresi dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan uji statistik glejser.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil uji analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,619	0,263		2,352	0,021
Akuntabilitas (AK)	1,022	0,251	1,044	4,069	0,000
Transparansi (TR)	1,655	0,242	1,786	6,837	0,000
Fungsi Pemeriksaan Intern (PI)	0,212	0,061	0,194	3,470	0,001

a. *Dependent Variable: KP*

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil dari perhitungan pada Tabel 6, sehingga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$KP = 0,619 + 1,022 AK + 1,655 TR + 0,212 PI + e$$

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model atau uji F akan disajikan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	8,176	3	2,725	114,288	0,000 ^a
	<i>Residual</i>	1,932	81	0,024		
	<i>Total</i>	10,108	84			

a. *Predictors: (Constant), PI, AK, TR*

b. *Dependent Variable: KP*

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan hasil pada Tabel 7, dapat diketahui nilai F hitung sebesar 114,288 dengan tingkat signifikan 0,00 atau lebih kecil (<) dari 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kerja pemerintah, uji model ini juga dikatakan layak digunakan dalam penelitian ini.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil pengujian koefisien determinasi R² akan disajikan pada Tabel 8 sebagai berikut ini:

Tabel 8
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi R²

<i>Model Summary</i>				
<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,899 ^a	0,809	0,802	0,15442

a. *Predictors: (Constant), PI, AK, TR*

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan nilai (R) sebesar 0,899, atau 89,9%, nilai R Square (R²) yang diperoleh yaitu 0,809 atau 80,9% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan kemudian sisanya 19,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Hasil uji hipotesis seperti yang nampak pada Tabel 9, sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients^a

	<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	0,619	0,263		2,352	0,021
	<i>Akuntabilitas (AK)</i>	1,022	0,251	1,044	4,069	0,000
	<i>Transparansi (TR)</i>	1,655	0,242	1,786	6,837	0,000
	<i>Fungsi Pemeriksaan Intern (PI)</i>	0,212	0,061	0,194	3,470	0,001

a. *Dependent Variable: KP*

Sumber: Sumber: Kuesioner, 2019 (diolah)

Berdasarkan Tabel 9, hasil dari uji t menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (1) Pengujian hipotesis pertama yaitu akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 4,069 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00 yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berhasil dalam menjalankan pelaksanaan organisasi yang telah ditetapkan; (2) Pengujian hipotesis kedua yaitu transparansi terhadap kinerja pemerintah. Hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 6,837 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00 yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Hal ini berarti bahwa adanya keterbukaan informasi antar pemerintah yang baik dapat dijangkau publik mengenai aspek kebijakan pemerintah, sehingga dari keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan toleran, kebijakan yang baik sesuai dengan referensi publik, dan persaingan politik yang sehat; (3) Pengujian hipotesis ketiga yaitu fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah. Hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 3,470 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,001 yang berarti $0,001 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya bahwa variabel fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi pemeriksaan intern yang lebih baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan

Pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah

Berdasarkan hasil uji regresi menunjukkan nilai t sebesar 4,069 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00 yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya bahwa variabel akuntabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Pengaruh yang terjadi mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo maka kinerja pemerintah OPD akan semakin meningkat. Pengaruh yang terjadi mengindikasikan bahwa semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo maka kinerja pemerintah OPD akan semakin meningkat. Setiap instansi yang ada di pemerintahan dituntut untuk mempertanggungjawabkan segala laporan keuangan dan laporan kinerja dengan menyajikan dan menjelaskan seluruh hasil dari program kegiatan yang telah dilaksanakan. Semua pihak yang berkepentingan juga dapat menilai apakah kinerja pemerintah telah terlaksana secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dalam pemerintahan dan merupakan ciri dari penerapan *good governance*. Laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai wujud akuntabilitas daerah merupakan bentuk dari semakin tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam hal ini pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program/kegiatan yang sudah dilaksanakan mengenai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pencapaian kinerja keuangan secara terbuka dan target-target anggaran serta mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan semua pertanyaan yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pelaksanaan program atau kegiatan dan fungsi merupakan tuntutan terhadap pemerintah pusat maupun daerah, sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami informasi tersebut. Semakin baik bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah yang berarti akuntabilitas mempengaruhi kinerja pemerintah dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah yang dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala bentuk aktivitas dalam organisasi pemerintah kepada masyarakat dan stake holder maupun seluruh pihak yang

berkepentingan merupakan salah satu cara untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan Suwardi (2018), Saputra *et al.*, (2014), Dewi (2015), Wiguna *et al.*, (2014), dan Auditya *et al.*, (2014).

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah

Transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah pada masing-masing OPD Kabupaten Sidoarjo, hal ini didasarkan pada uji hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 6,837 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00 yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Artinya bahwa variabel transparansi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Semakin baik transparansi yang diterapkan pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Semakin baik transparansi yang diterapkan pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Salah satu wujud komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ialah adanya keterbukaan informasi dalam menjalankan pemerintahan. Keterbukaan informasi yang dijalankan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sehingga pengelolaan anggaran dari setiap kegiatan yang sedang maupun sudah dilaksanakan dapat diketahui secara umum dan terbuka untuk semua pihak baik secara internal maupun eksternal. Pemberian informasi diberikan secara memadai dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam suatu organisasi. Pentingnya akses informasi menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

Melalui transparansi tersedia informasi yang memadai tentang penyusunan rencana kerja dan informasi tentang laporan keuangan daerah yang diberikan tepat waktu dan handal. Transparansi terbuka dalam memberikan informasi tentang adanya aktifitas pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang telah tersedia harus memadai sehingga dapat dipantau dan dipahami. Transparansi juga dapat memberikan informasi dan salah satu prinsip *good governance*. Informasi dalam arti yaitu, keterbukaan informasi yang dapat dijangkau publik tentang aspek kebijakan pemerintah. Dari keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan toleran, kebijakan yang baik sesuai dengan referensi publik, dan persaingan politik yang sehat. Dalam organisasi perlu adanya keterbukaan informasi yang diselenggarakan pemerintah yang mudah dipahami dan memadai sehingga semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut dapat dengan mudah menggunakan dan mengakses informasi tersebut, baik dari aspek kebijakan pemerintah maupun pengelolaan keuangan. Semakin mudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang program penyelenggaraan pemerintah, maka semakin tinggi nilai transparansi. Transparansi dengan azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan atau perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia Negara untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Damayanti dan Suwardi (2018), Saputra *et al.*, (2014), Dewi (2015), Wiguna *et al.*, (2014), dan Auditya *et al.*, (2014).

Pengaruh Fungsi Pemeriksaan Intern terhadap Kinerja Pemerintah

Pengujian hipotesis pada penelitian ini memberikan hasil bahwa fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, hal ini didasarkan pada hasil regresi yang menunjukkan nilai t sebesar 3,470 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,001

yang berarti $0,001 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, maka variabel fungsi pemeriksaan intern berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Fungsi pemeriksaan intern berbicara tentang hasil yang dicapai pada masing-masing OPD. OPD memiliki sistem dan pedoman serta prosedur kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi OPD secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah berlaku, merupakan OPD yang telah bertindak sebagai pemerintahan yang baik dan termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Secara umum pemeriksaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif dengan pemberian pendapat atau apabila di pandang perlu direkomendasi.

Fungsi pemeriksaan intern atas penyelenggaraan pemerintah merupakan dorongan untuk terwujudnya *good governance*. Fungsi utama pemeriksaan intern dalam pemerintahan untuk membentuk pimpinan pemerintahan untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengendalian serta dapat memastikan keandalan sistem pengendalian intern pemerintahan yang termasuk pengendalian akuntansi dan melakukan pelaporan kepada pimpinan pemerintah daerah. Pemeriksaan atas keuangan negara dapat dilakukan oleh pemeriksa intern dan pemeriksa eksteren pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang yang ditetapkan, dan pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada suatu standar pemeriksaan. Pengawasan dapat dilakukan atau dilengkapi dengan pemeriksaan akan tetapi tidak setiap kegiatan pengawasan harus dilakukan melalui pemeriksaan, seperti pengawasan yang dilakukan antara lain oleh DPR dan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat dengan menggunakan pengaruhnya dengan tujuan memotivasi serta mendorong bawahan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Individu yang terlibat diberi tanggung jawab dalam proses penyusunan anggaran sehingga penyusunan anggaran lebih baik dan kinerja organisasi semakin tinggi. Pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif demi mewujudkan pemerintahan yang baik dalam tugas kepemimpinan. Hasil yang didapat dalam penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratnawati dan Arnold (2011) dan Jitmau (2017).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan membagikan kuesioner pada setiap OPD kabupaten Sidoarjo, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: (1) Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada OPD Kabupaten Sidoarjo dengan diperkuatnya hasil perolehan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,809 atau 80,9% yang menunjukkan bahwa variasi yang terjadi pada variabel kinerja pemerintah OPD Kabupaten Sidoarjo dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi dan 19,1% dari sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk pada model regresi; (2) Akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil regresi yang dapat menunjukkan nilai t sebesar 4,069 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00 yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, berarti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; (3) Transparansi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 6,837 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,00

yang berarti $0,00 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah; (4) Fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah dengan hasil regresi menunjukkan nilai t sebesar 3,470 dengan tingkat signifikan yaitu sebesar 0,001 yang berarti $0,001 < 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, yang berarti bahwa variabel fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Pengambilan data dalam penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner di setiap OPD Kabupaten Sidoarjo dan masih memiliki kendala baik dalam proses perizinan maupun pengisian kuesioner. Hal tersebut dapat menimbulkan kurang optimalnya pengumpulan data yang didapat; (2) Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga memiliki kemungkinan responden memiliki jawaban yang pasti. Jawaban yang bias dapat menimbulkan adanya kesalahan yang konsisten dalam memperkirakan sebuah nilai karena jawaban dari masing-masing responden sangatlah berbeda.

Saran

Penelitian ini dapat dikembangkan secara keseluruhan dengan beberapa saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini adalah saran- saran yang dapat diberikan: (1) Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah kabupaten Sidoarjo, namun hasil penelitian tersebut masih ada dimensi yang lain yang perlu diperbaiki seperti perlunya komunikasi antar public yang lebih sempurna sehingga berdampak pada kinerja pemerintah yang lebih bagus sehingga meningkatkan kinerja pemerintah; (2) Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode lain untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan lebih intens dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada pihak yang berkaitan sehingga jawaban yang diharapkan dari responden mencerminkan jawaban yang sebenarnya; (3) Adanya perluasan objek penelitian juga diharapkan misalnya menambah jumlah sampel dan tidak hanya terbatas pada 15 OPD Kabupaten Sidoarjo sehingga hasil yang diinginkan bisa lebih maksimal dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas; (4) Bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti topik selain ini, selain untuk memberikan bukti empiris dan diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah variabel independen karena berkaitan dengan pengaruh terhadap suatu kinerja pemerintah seperti gaya kepemimpinan, budaya organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan lain-lain. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran-gambaran luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan; (5) Dilakukan adanya koordinasi terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan sebagai proses wawancara atau pengisian kuesioner agar proses wawancara dan pengisian kuesioner dalam pengambilan data bisa berjalan dengan lancar dan sesuai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Auditya, L., Husaini., dan Lismawati. 2014. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*. 3 (1).
- Bastian, I. 2008. *Akuntansi Kesehatan*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Damayanti, E., dan S. B. Suwardi. 2018. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Dewi, r. T. 2015. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. *Jurnal Trikonometika*. 14 (1): 1-12.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21*. Cetakan Kedelapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang

- Ichsan, P. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Ranting. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jitmau, F. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong). *Tesis*. Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Krina L.P.L. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
- Mahsun, M. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2 (1): 21-32.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. No. 29 Tahun 2014. *Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara. No. 25 Tahun 2012. *Tentang Petunjuk dalam Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Ratnawati. J dan P.C.W. Arnold. 2011. *Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah, Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi. *Jurnal Dian*. 11 (1): 1-19.
- Saputra, D. S., Darwanis., dan A. Syukriy. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Aceh). *Jurnal Akuntansi*. 2 (3): 76-84. ISSN 2302-0164.
- Sihaloho, J. R. A. S. Surya. dan Supriono. 2013. Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Akuntansi*. 3 (4): 1-17.
- Sopannah dan W. Isa. 2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Spanse, M. 1973. Job Market Signalling. *The Quartely Journal of Economics*. 87 (3): 355-374.
- Sumarno. 2005. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Simposium Nasional Akuntansi VIII*. Solo
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia. No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- _____. No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. No. 25 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Wiguna. M. B. S., A. Y. Gede, Dan A. S. D. Nyoman. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Akuntansi*. 3 (1): 21-33.